

EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN DARI PERUBAHAN BENTUK PELAYANAN SATUAN KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (STUDI KASUS RSUD SANJIWANI GIANYAR)

Oleh :

A.A. Devi Widyaswari

Ibrahim R.

Cokorda Dalem Dahana

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan

Fakultas Hukum-Universitas Udayana

Abstrak

Di dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Kesehatan Dari Perubahan Bentuk Pelayanan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (Studi Kasus RSUD Sanjiwani Gianyar)”. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis empiris. Paradigma di dalam bidang keuangan negara terdapat pergeseran dari penganggaran yang bersifat tradisional menjadi penganggaran yang berbasis kinerja. Terdapat permasalahan yaitu apakah RSUD Sanjiwani Gianyar sudah melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) dan bagaimana implikasi dari PPK-BLUD terhadap pelayanan kepada masyarakat. PPK-BLUD memberikan fleksibilitas dan efisiensi menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. RSUD Sanjiwani Gianyar sudah efektif menerapkan PPK-BLUD.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan Kesehatan, Perubahan Bentuk Satuan Kerja, Badan Layanan Umum Daerah.

Abstract

This paper entitled “The Effectiveness Of Service Health By Changing The Service Unit Into General Service District Body (Case Study in Sanjiwani Hospital of Gianyar)”. This paper uses juridical emperical methods. The paradigm in the state financial sector there is a shift from the traditional estimation, becomes estimation performance based budgeting. One form of performance-based budgeting is BLUD. There are a problems , are RSUD Sanjiwani Gianyar have been applied financial management pattern of the general services district (PPK-BLUD) and how is the implication of PPK-BLUD towards service for society. PPK-BLUD provides flexibility and efficiency in the form of discretion in the body business practises to improve service for healthy societies. RSUD Sanjiwani Gianyar have been effective to apply PPK-BLUD.

Keyword : Effectiveness, Service Of Health, Changes In Unit Form, The General Service District Body.

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU. No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selanjutnya UU. No 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan anggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah dengan memberikan peluang kepada instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan

produktivitas, efisiensi, dan efektifitas.¹Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka dibentuklah Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PP BLU).

Khususnya untuk Pola Pengelolaan Keuangan BLUD lebih lanjut diatur di dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Esensi dari BLUD adalah peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran.

Studi kasus yang penulis lakukan adalah di RSUD Sanjiwani Gianyar. Karena RSUD Sanjiwani Gianyar sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Gianyar No. 56 tahun 2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar, Peraturan Bupati Gianyar Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akutansi Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar.

1.2 Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Efektivitas Perubahan Bentuk Pelayanan Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis artinya mendekati permasalahan dari segi hukum. Sedangkan pendekatan empiris yaitu mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan RSUD Sanjiwani Sebelum ditetapkan sebagai BLUD(SKPD)

¹W. Riawan Tjandra, 2009, *Hukum Keuangan Negara*, Kompas Gramedia, Jakarta, hal. 44.

²Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, MandarMaju, Bandung, hal. 3.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A.A. Gde Putra Adnyana Wiratman (Staf Sub. Bid. Perencanaan Program RSUD Sanjiwani Gianyar), pengelolaan keuangan RSUD Sanjiwani sebelum menerapkan PPK BLUD, yaitu :

1. Perencanaan yaitu mengkompilasi usulan dr unit terkecil (usulan. Pendapatan dan belanja) selanjutnya RKA dibahas,dan disepakati besaran pendapatan dan belanja RS. Melalui Sub.Bag anggaran Setda Kab Gyr diterbitkan DPA. DPA turun, SKPD wajib mengelola sesuai anggaran dlm DPA, lalu pada triwulan 1-3 dilakukan evaluasi besaran penyerapan pelaksanaan anggaran. Selanjutnya penganggaran yaitu harus tunduk pada DPA (sumber dana APBN dan APBD II).Pelaksana anggaran, menggunakan anggaran sesuai DPA, tidak boleh melebihi dari anggaran DPA dan Laporan keuangan, kepala SKPD menyusun dan melaporkan laporan kas kepada Kepala Daerah.

2.2.2 Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Sanjiwani Gianyar

Pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan sudah memikirkan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya, hal ini terbukti dengan dibentuknya Puskesmas, Posyandu, dan Rumah Sakit,³ karena pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun Siklus Pengelolaan Keuangan di RSUD Sanjiwani Gianyar berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Penunjang Medis,A.A. Gede Suputra Siklus Pengelolaan Keuangan dimulai dari :

1. Perencanaan, dikerjakan oleh sub.bid perencanaan . Terdiri dari perencanaan SDM, Pemeliharaan Gedung, alat-alat, dan belanja. Dibuat dalam bentuk DPA yg terdiri dari RKA dan RBA. Selanjutnya penganggaran terdiri dari APBN, APBDII, Pendapatan Fungsional, hibah, dan pendapatan lain. Pelaksanaan anggaran, yaitu mengacu pada DPA tahun berjalan , jika seandainya kebutuhan berubah pada tahun berjalan, maka bisa dilakukan penambahan anggaran pada DPA perubahan dan Laporan Keuangan untuk RSUD Sanjiwani Gianyar menggunakan SAP (Standar

³Achmad Farich, 2012, *Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat*,Gosyen Publishing, Yogyakarta, hal. 2.

Akuntansi Pemerintah), karena RSUD Sanjiwani Gianyar merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kab. Gianyar.

Sesuai Peraturan Bupati Gianyar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (pasal 2), diperbolehkan melakukan belanja pada kegiatan belanja obat-obatan, bahan pengemas obat-obatan, bahan laboratorium, radiologi, bahan makan dan minuman pasien, dokter jaga, para medis dan residence dan alat tulis kantor.

Tabel Perbandingan antara SKPD dengan BLUD

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A.A. Gde Suputra (Ketua Tim BLUD RSUD sanjiwani Gianyar – Kabid Penunjang Medis) dapat dilihat perbandingan antar BLUD dan Non BLUD beserta hasilnya.

No	Uraian	Satker Non BLUD	Satker BLUD	Keuntungan
1	Pengelola	PNS	PNS dan Non PNS	Secepatnya kebutuhan tenaga dapat terpenuhi
2	Piutang/utang	Tidak diperbolehkan melakukan piutang/utang	Diperbolehkan melakukan piutang/utang	Dengan diperbolehkan melakukan utang, maka kebutuhan pasien dapat dengan cepat terpenuhi.
3	Pendapatan	Setor langsung ke kas daerah	Digunakan langsung	Pendapatan dapat digunakan langsung, maka akan lebih cepat terpenuhinya kebutuhan pasien akan obat-obatan.
4	Dokumen Penganggaran	Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Rencana Bisnis Anggaran (RBA)	Karena BLUD di utamakan jiwa kewirausahaan maka dari itu dokumen penganggaran juga disebut Rencana Bisnis Anggaran.
5	Keuangan	Ke kas daerah	Memiliki rekening bank	Dapat langsung mengelola rekening bank untuk digunakan dalam memberikan pelayanan kpd pasien.
6	Laporan keuangan	SAP	SAK	Sebagai SKPD yang memiliki fleksibilitas dlm peng. Keu, maka RS seharusnya membuat pelaporan keuangan dalam bentuk SAK. (belum bisa terlaksana).

2.3 Implikasi PPK-BLUD di RSUD Sanjiwani Gianyar terhadap Pelayanan kepada Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Bapak A.A. Gede Suputra (Ketua Tim BLU RSUD Sanjiwani Gianyar-Kabid Penunjang Medis) PPK-BLUD telah memberikan manfaat bagi kelancaran pemberian layanan kepada masyarakat, antara lain:

1. Dari segi SDM, BLUD bisa mengangkat SDM secara langsung baik dokter/ dokter spesialis, pegawai administrasi, maupun perawat (sebagai tenaga kontrak).
2. Alat maupun peralatan kedokteran dapat dibeli secara langsung sebagai penunjang kegiatan (alat operasi).
3. Dengan adanya fleksibilitas dari pada obat-obatan sehingga segala bentuk maupun jumlah obat yang diperlukan dalam satu tahun pelayanan bisa secara langsung diadakan tidak berpengaruh terhadap jumlah anggaran yang direncanakan.

III. KESIMPULAN

1. Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar sudah efektif menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Walaupun dalam membuat pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang masih menggunakan SAP yang seharusnya menggunakan SAK. Implikasi yang timbul dari menerapkan PPK-BLUD bagi masyarakat adalah dengan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar dapat langsung menggunakan pendapatan operasionalnya untuk membeli obat-obatan, alat medis, perbaikan gedung, dll. Dari segi SDM, BLUD bisa mengangkat SDM secara langsung baik dokter, pegawai administrasi, maupun perawat (tenaga kerja kontrak).

IV. DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Farich, Achmad, 2012, *Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Tjandra, W. Riawan, 2009, *Hukum Keuangan Negara*, Kompas Gramedia, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Keputusan Bupati Gianyar Nomor. 56 Tahun 2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar.